



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KAB. PAMEKASAN MENURUT PENGELUARAN 2014 – 2018





**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KAB. PAMEKASAN
MENURUT PENGELUARAN
2014 – 2018**

<https://pamekasankab.bps.go.id>

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pamekasan Menurut Pengeluaran 2014-2018

Nomor Publikasi :

35280.1903

Katalog BPS :

9302020.3528

Ukuran Buku :

A4 (21 cm x 29,7 cm)

Jumlah Halaman :

x + 68

Tim Penulis :

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh :

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu indikator ekonomi makro, diperlukan juga untuk menggambarkan kondisi perekonomian Kabupaten Pamekasan melalui penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi pengeluaran. Penghitungan PDRB menurut pengeluaran menggunakan tahun dasar 2010, dengan menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh United Nations. Gambaran pengeluaran akhir seluruh komponen PDRB, disajikan dalam buku **Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pamekasan Menurut Pengeluaran 2014-2018** ini.

Dalam publikasi ini disajikan tabel-tabel PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan menurut komponen, baik dalam bentuk nilai nominal maupun persentase. Publikasi ini juga menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Kabupaten Pamekasan secara deskriptif untuk menggambarkan secara garis besar struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan data, diucapkan terima kasih. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Pamekasan, Agustus 2019

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Pamekasan



Dicky Harryadi SE, M.E

NIP. 196703221993031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
PENJELASAN TEKNIS	viii
1. PENDAHULUAN	3
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran	3
1.2. Perubahan Tahun Dasar	6
2. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	13
2.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)	13
2.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT (PK-LNPRT)	15
2.3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)	16
2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	18
2.5. Perubahan Inventori (PI)	20
2.6. Ekspor - Impor	22
3. TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN PAMEKASAN	27
3.1. Perkembangan PDRB Pengeluaran	27
3.2. Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran	34
4. PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN PAMEKASAN MENURUT PENGELUARAN	53
4.1. PDRB (Nominal)	53
4.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir	54
5. PENUTUP	59
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Pamekasan, 2014-2018	27
Tabel 2.	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kabupaten Pamekasan, 2014-2018	34
Tabel 3.	Perkembangan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Pamekasan, 2014-2018	36
Tabel 4.	Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kab. Pamekasan, 2014-2018.....	39
Tabel 5.	Perkembangan Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPR	40
Tabel 6.	Perkembangan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kab. Pamekasan, 2014-2018	42
Tabel 7.	Perkembangan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kab. Pamekasan, 2014-2018	45
Tabel 8.	Perkembangan Komponen Perubahan Inventori Kab. Pamekasan, 2014-2018.....	46
Tabel 9.	Perkembangan Komponen Ekspor Kab. Pamekasan, 2014-2018	48
Tabel 10.	Perkembangan Komponen Impor Kab. Pamekasan, 2014-2018	49
Tabel 11.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kab. Pamekasan 2014-2018.....	53
Tabel 12.	Proporsi Total Konsumsi Akhir Terhadap PDB Kabupaten Pamekasan, 2014-2018.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkembangan PDRB Kabupaten Pamekasan, 2014-2018.....	28
Gambar 2. PDRB ADHB dan Penduduk Kab. Pamekasan, 2014-2018	29
Gambar 3. PDRB ADHK (2010=100) dan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Pamekasan Tahun 2014-2018	30
Gambar 4. Distribusi Persentase PDRB Kab. Pamekasan Menurut Pengeluaran ADHB, 2014-2018.....	31
Gambar 5. Pertumbuhan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, LNPRT dan Konsumsi Pemerintah Kab. Pamekasan, 2014-2018.....	32
Gambar 6. Pertumbuhan Komponen PMTB, Komponen Ekspor dan Impor Kab. Pamekasan, 2014-2018	33
Gambar 7. Proporsi Makanan dan Non Makanan Terhadap Total Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Pamekasan, 2014-2018.....	37
Gambar 8. Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Perkapita dan Penduduk Kabupaten Pamekasan, 2014-2018	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. PDRB Kab. Pamekasan Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku, 2014-2018	63
Lampiran 2. PDRB Kab. Pamekasan Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan (2010=100), 2014-2018	64
Lampiran 3. Distribusi Persentase PDRB Kab. Pamekasan Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku, 2014-2018	65
Lampiran 4. Pertumbuhan PDRB Kab. Pamekasan Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan (2010=100), 2014-2018	66
Lampiran 5. Indeks Harga Implisit PDRB Kab. Pamekasan Menurut Pengeluaran, 2014-2018	67
Lampiran 6. Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Kab. Pamekasan Menurut Pengeluaran, 2014-2018	68

PENJELASAN TEKNIS

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2014 s.d 2018 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Pamekasan pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran difokuskan pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar wilayah. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk dan rumah tangga), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2014 s.d 2018, sehingga mudah dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).

5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Pamekasan terhadap ekonomi luar daerah.

<https://pamekasankab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pamekasankab.go.id>

<https://amekasankab.bps.go.id>
1

Pendahuluan



BAB I PENDAHULUAN

1.1. PENGERTIAN PDRB MENURUT PENGELUARAN

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB Menurut Lapangan Usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah, bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel pengeluaran konsumsi akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda tersebut dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan dalam membuat

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

estimasi; ii) memberi manfaat lebih dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antara keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi.

Penyusunan data PDRB Pengeluaran juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber

pendapatan masyarakat³ yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “output akhir (*final output*)”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan Keynesian sebagai berikut :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Dimana :

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan diatas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto”.

³ - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik

- Disebut sebagai pendekatan “riil”

- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

Sebagaimana PDRB Produksi, PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2. PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan *System of National Account (SNA)* 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi,

cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- b. Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;

- c. Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- d. Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- e. Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- f. Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

– Konsep dan Cakupan

- a. Sumber daya hayati (*Cultivated Biological Resources/CBR*). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
- b. Sistem persenjataan (*Military Weapon Systems/MWS*). MWS merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
- c. Penelitian dan pengembangan (*Research and Development/RnD*). RnD merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti R&D tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
- d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*Mineral Exploration and Evaluation/MEE*). MEE merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

- menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
 - f. Komputer software (*Computer Software and Databases/CSD*). CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan databases, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - g. Produk kekayaan intelektual (*Entertainment, Literary or Artistic Originals/ELA*). ELA merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

– Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial Intermediation Services Indirectly Measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

– Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

– **Klasifikasi**

Klasifikasi yang digunakan adalah *Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4)* dan *Central Product Classification (CPC rev.2)*. BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

<https://pamekasankab.bps.go.id>

2

Metode Estimasi dan Sumber Data



BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PK-RT)

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB Pengeluaran⁵. Disamping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol dan tembakau
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel

⁵ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasikan kedalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)

Komponen PK-RT diestimasi dengan metoda sebagai berikut:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita hasil Susenas;
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12;
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator *suply*;
5. Diperoleh nilai PK-RT atas dasar harga berlaku;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

2.2. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT)

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tidak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

LNPRT merupakan bagian dari Lembaga Non Profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumah tangga. LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial, Organisasi Profesi, Perkumpulan Sosial/Kebudayaan/Olahraga/Hobi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Keagamaan, dan Organisasi Bantuan Kemanusiaan/Beasiswa.

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll;
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan lain-lain;
- c. Penyusutan;
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan lain-lain.

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-LNPRT bersumber dari :

- a. Survei Khusus Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (SK-LNP), BPS;
- b. Hasil up-dating direktori LNPRT, BPS;

c. Indeks Harga Konsumen, BPS.

Komponen PK-LNPRT diestimasi dengan cara sebagai berikut:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (ADHB);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

2.3. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini

masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup kegiatan:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidentil dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam prakteknya, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing. PK-P kabupaten/kota mencakup:

- a. PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota;
- b. PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan;
- c. PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Badan Keuangan Daerah dan Bappeda;
- b. Laporan Realisasi Anggaran institusi pusat dan provinsi, KPPN;
- c. Statistik Keuangan Daerah, BPS;
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Dinas Pendapatan Kabupaten dan Bappeda;
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS.

Komponen PK-P Kab/Kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

$$PK-P ADHB = \text{Output - Penjualan barang dan jasa} + \\ \text{Social transfer in kind purchased market production} + \\ \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain. Sedangkan PK-P ADHK diestimasi dengan men-deflate PK-P ADHB dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	-
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
<i>Social Transfer in kind</i>	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI	-	Neraca Jasa

2.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasikan menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri/wilayah, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri/wilayah (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain.

Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

Sumber data yang dibutuhkan untuk mengestimasi PMTB adalah:

- a. Output industri konstruksi, BPS;
- b. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS;
- c. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS;
- d. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS;
- e. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS;
- f. Data Sekunder dari instansi terkait.

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah, sebagai berikut :

▪ **Metoda Langsung:**

- PMTB atas dasar harga berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

- PMTB atas dasar harga berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi
- PMTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara *men-deflate* PMTB atas dasar harga berlaku dengan IHPB sebagai berikut:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

- IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

▪ **Metoda Tidak Langsung:**

- Pendekatan Supply
PMTB atas dasar harga berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB
- Pendekatan Ekstrapolasi
PMTB atas dasar harga konstan (t) = PMTB atas dasar harga konstan (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5. PERUBAHAN INVENTORI (PI)

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting, guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sebagai berikut :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual dan pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai

bahan bakar atau persediaan;

- f. Ternak untuk tujuan dipotong; serta
- g. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah:

1. Laporan keuangan perusahaan swasta/BUMN/BUMD hasil kegiatan survei;
2. Data komoditas pertambangan, BPS;
3. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
4. Data komoditas perkebunan;
5. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
6. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
7. Data persediaan beras (Bulog) dan data ternak (Dinas Peternakan).

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

- a. **Metoda Revaluasi**, metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

- **PI ADHB** = $\text{Vol Inventori (t)} - \text{Vol Inventori (t-1)} \times \text{Harga per unit}$

- **PI ADHK** = $\text{PI Atas Dasar Harga Berlaku} / \text{IHPB}$

- b. **Metoda Deflasi**, metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

- **PI ADHK** = $\text{Inventori (t) ADHB/IHPB (t)} - \text{Inventori (t-1) ADHB/IHPB (t-1)}$

- **PI ADHB** = $\text{PI ADHK} \times \text{IHPB rata-rata (t)}$

2.6. EKSPOR - IMPOR

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah

yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestiknya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan dibidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri). Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pamekasan.kab.bps.go.id>

3

Tinjauan Ekonomi Kab. Pamekasan



BAB III

TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN PAMEKASAN

3.1. PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, yakni tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts* (SNA) yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDRB tersebut.

Tabel 1 dibawah ini adalah hasil penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 serta pertumbuhannya sejak tahun 2010. Kemampuan wilayah Kabupaten Pamekasan dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Kondisi ini digambarkan oleh nilai PDRB Kabupaten Pamekasan yang cenderung mengalami peningkatan.

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pamekasan, 2010-2018

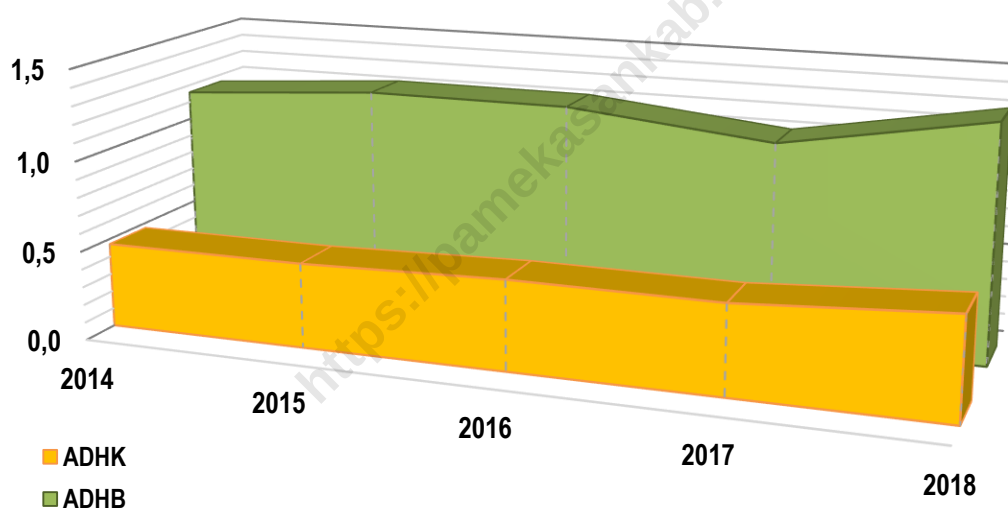
Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah)	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (%)
2010	6.994.188,1	6.994.188,1	-
2011	7.929.396,2	7.429.359,4	6,22
2012	8.901.404,8	7.894.002,3	6,25
2013	9.909.770,1	8.375.221,7	6,10
2014	11.067.050,2	8.846.162,4	5,62
2015	12.299.295,3	9.316.856,7	5,32
2016*	13.528.033,5	9.815.773,6	5,35
2017*	14.640.576,0	10.310.241,6	5,04
2018**	15.952.062,2	10.873.486,8	5,46

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dibandingkan tahun 2014, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pamekasan meningkat 4,89 triliun rupiah dari 11,07 triliun rupiah menjadi 15,95 triliun rupiah pada tahun 2018. Sejak tahun 2010, perkembangan terbesar nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku terjadi dari tahun 2017 ke tahun 2018 yang mencapai 1,31 triliun rupiah. Hasil penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan juga mengalami peningkatan. Dibandingkan tahun 2014, PDRB Pamekasan pada tahun 2018 meningkat 2,03 triliun rupiah menjadi 10,87 triliun rupiah. Berbeda dengan hasil penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yang pertumbuhannya cenderung meningkat tiap tahunnya (kecuali tahun 2017), PDRB Atas Dasar Harga Konstan mengalami penambahan yang cenderung datar pada kisaran 0,48 triliun rupiah tiap tahunnya.

Gambar 1
Perkembangan PDRB Kab. Pamekasan, 2014-2018 (Triliun Rp)

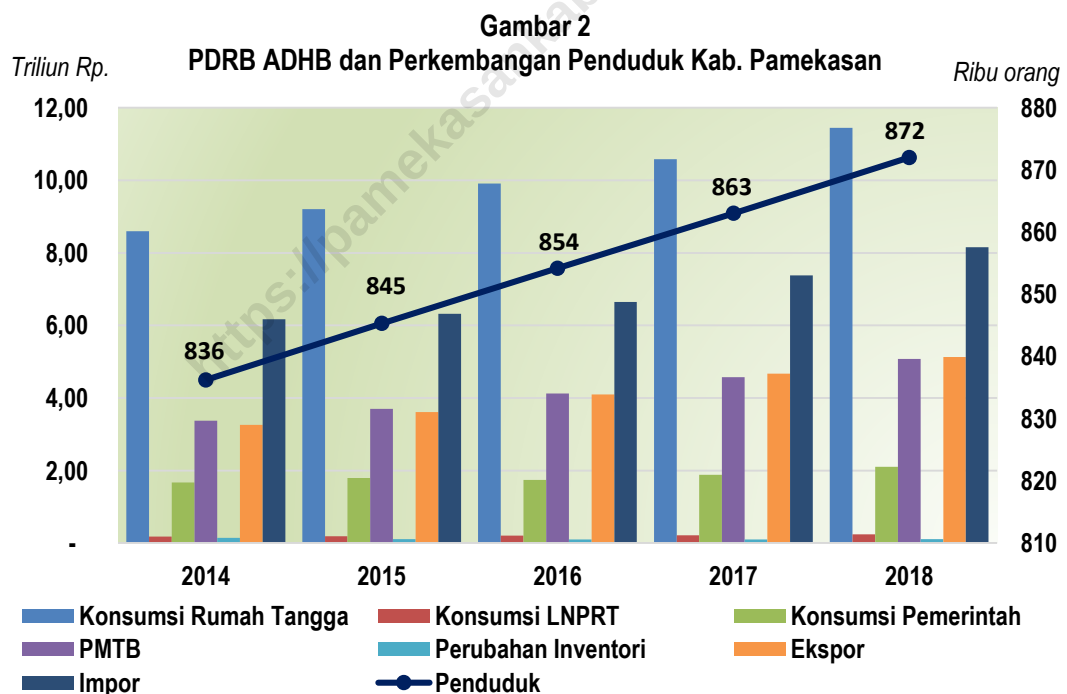


Ilustrasi diatas menggambarkan bahwa perkembangan tiap tahun nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku selalu lebih tinggi dibandingkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan, pengaruh dari perubahan harga tersebut telah ditiadakan.

Di tengah kondisi perekonomian nasional yang cenderung melemah, perekonomian Kabupaten Pamekasan selama tahun 2014 - 2018 tetap tumbuh diatas 5 persen, bahkan pada tahun terakhir kembali menunjukkan trend percepatan. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*)

maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi Konsumsi, serta kategori Informasi dan Komunikasi yang selalu tumbuh diatas tujuh persen setiap tahunnya. Sementara itu, dari sisi permintaan akhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan ditopang oleh pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Ekspor yang menyumbang rata-rata pertumbuhan diatas enam persen.

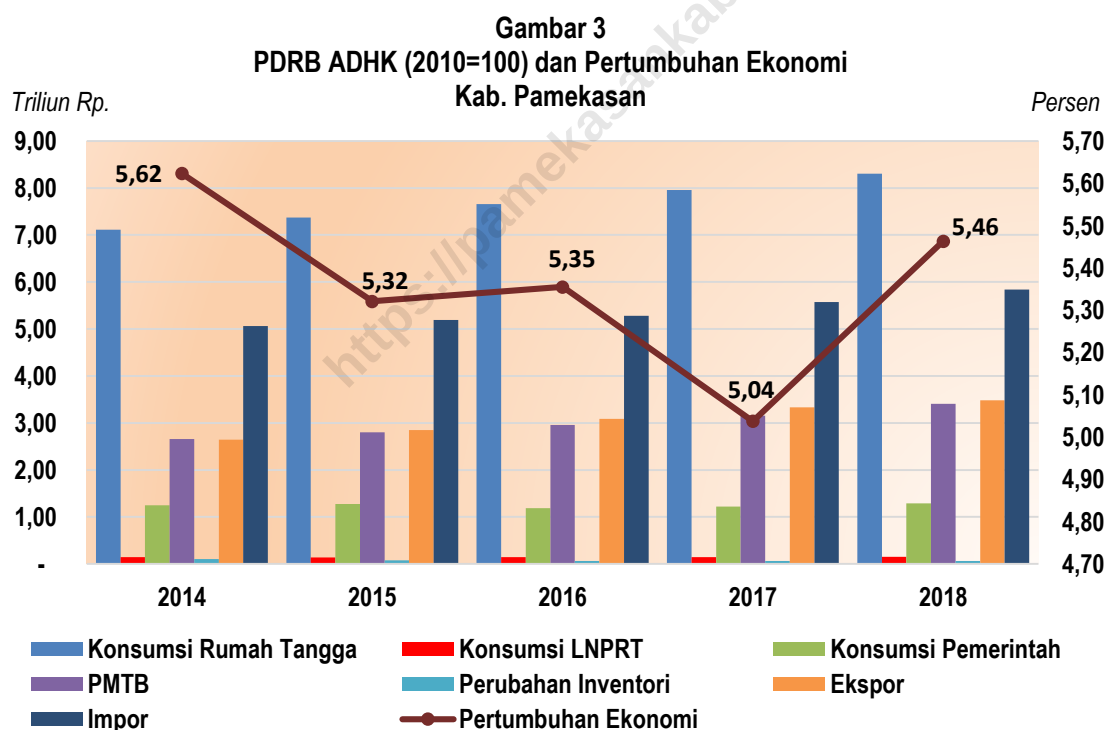
Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Ekspor Neto (E) atau Ekspor minus Impor barang dan jasa.



Perkembangan tiap komponen PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Pamekasan selama periode 2014-2018 diilustrasikan sebagaimana gambar 2 diatas. Pada periode tersebut, PDRB Pamekasan Atas Dasar Harga Berlaku meningkat cukup signifikan. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume tiap komponen. Peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir ini sejalan dengan peningkatan yang juga terjadi pada PDRB dari sisi produksi. Dari tujuh komponen

pengeluaran, enam komponen diantaranya terus mengalami peningkatan, hanya komponen Perubahan Inventori yang selalu berfluktuasi. Namun karena kontribusinya sangat kecil, fluktuasi Perubahan Inventori yang terjadi hampir tidak berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Pamekasan.

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis pengeluaran yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir.

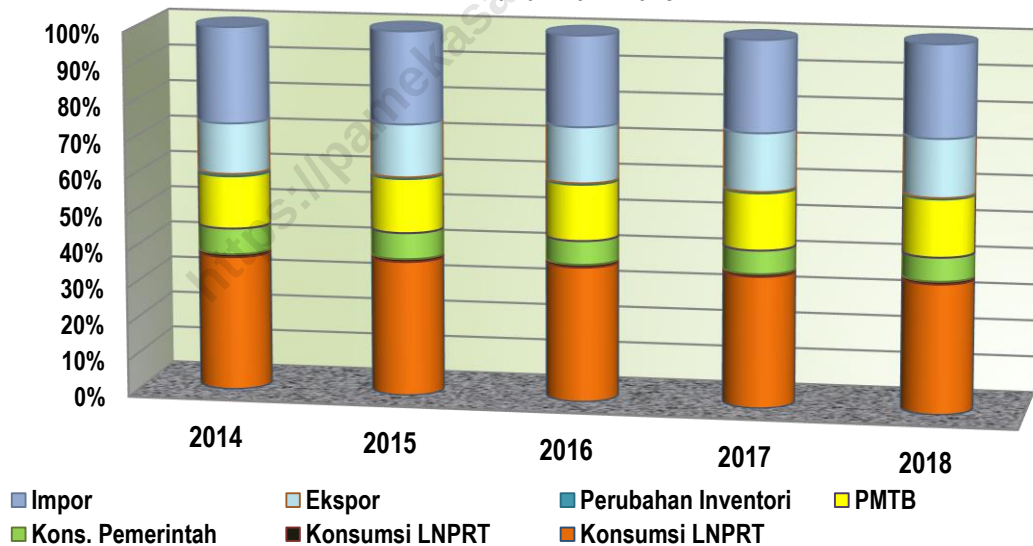


Dari gambar 3 diatas, terlihat nilai beberapa komponen utama PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Pamekasan cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Komponen tersebut adalah Konsumsi Rumah Tangga, PMTB, serta komponen Ekspor dan Impor. Keempat komponen tersebut secara konsisten terus meningkat, walaupun peningkatannya cukup fluktuatif antar tahun. Sementara itu, komponen

Konsumsi LNPRT hanya sampai dengan tahun 2014 yang mengalami peningkatan yang signifikan, sedangkan pada tahun 2015 turun sebesar Rp. 5,7 milyar menjadi Rp. 138,0 milyar. Menjelang menghadapi pemilu serentak, pada tiga tahun berikutnya komponen ini kembali tumbuh lebih cepat hingga mencapai Rp. 155,4 milyar pada tahun 2018. Sementara itu, perkembangan komponen Perubahan Inventori berfluktuasi tiap tahunnya.

Melambatnya kinerja beberapa komponen PDRB Atas Dasar Harga Konstan, menyebabkan pertumbuhan ekonomi Pamekasan selama lima tahun terakhir berfluktuasi cenderung melambat. Walaupun pada tahun 2018 kembali menggeliat tumbuh lebih cepat 5,46 persen karena terdongkrak pertumbuhan komponen Konsumsi Rumah Tangga, LNPRT, Konsumsi Pemerintah, dan PMTB, namun capaian pertumbuhan ini tetap lebih lambat dibandingkan tahun 2014.

Gambar 4
Distribusi Persentase PDRB Kab. Pamekasan Menurut Pengeluaran
ADHB Tahun 2014-2018



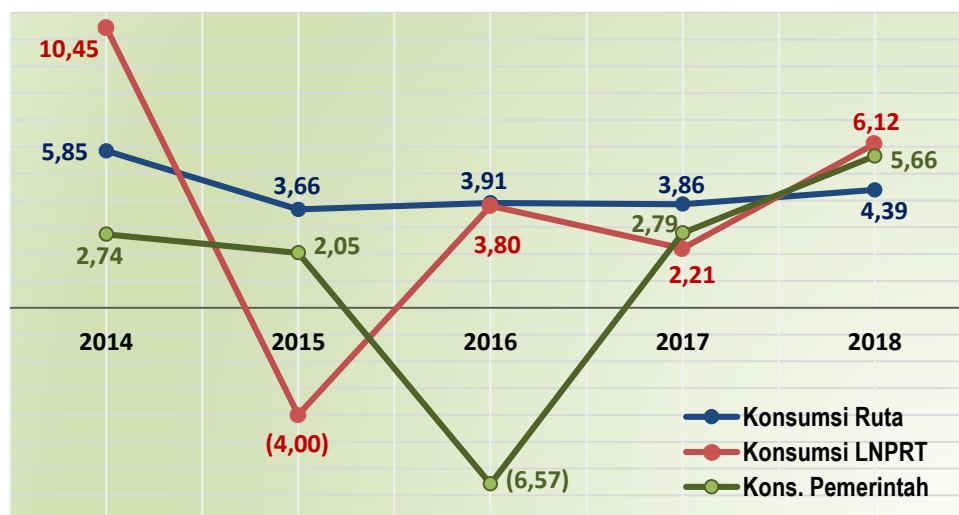
Selama periode 2014-2018, PDRB Kabupaten Pamekasan sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT). Walaupun mempunyai kecenderungan menurun, namun proporsi komponen ini masih diatas 70 persen. Pengeluaran untuk akitvitas Pembentukan Modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 30 hingga 32 persen. Sementara itu, kontribusi komponen Konsumsi Pemerintah (PK-P) masih berada pada rentang 12 sampai dengan 15 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam

menyerap PDRB tidak terlalu besar, berada pada posisi kelima diatas komponen konsumsi LNPR dan Perubahan Inventori. Dimana kedua komponen yang disebut terakhir, kontribusinya tidak sampai 2 persen.

Komponen lainnya yang relatif besar kontribusinya adalah Ekspor dan Impor. Namun demikian, meskipun komponen Ekspor berkontribusi sekitar 29 hingga 32 persen, tetapi di sisi lain komponen Impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB sisi pengeluaran juga masih berkontribusi cukup besar, yakni sekitar 49 hingga 56 persen. Sampai dengan tahun 2018, transaksi perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasikan oleh komponen Ekspor dan Impor menunjukkan bahwa impor selalu lebih tinggi dari ekspor. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri (impor).

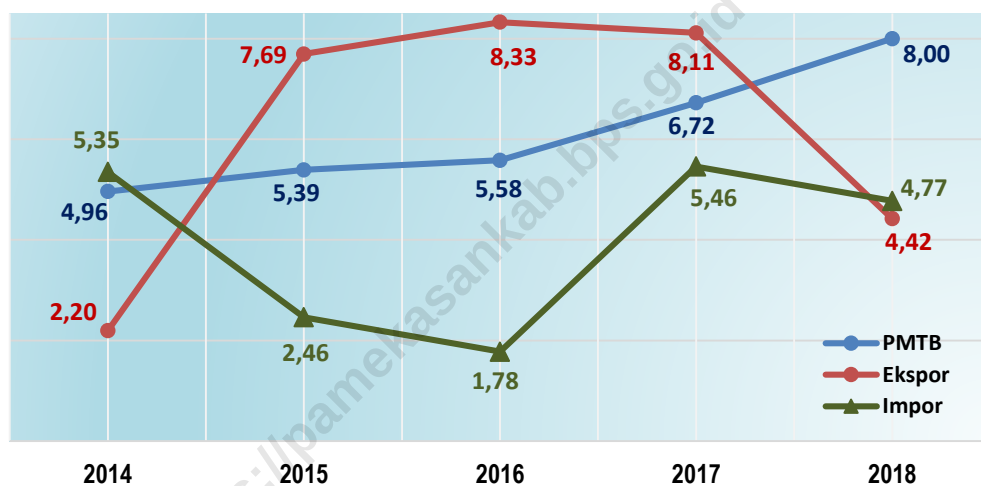
Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Selama periode tahun 2014-2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan berfluktuasi cenderung melambat. Tumbuh 5,62 persen pada tahun 2014 terus melemah hingga hanya tumbuh 5,04 persen pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018, kinerja ekonomi kembali tumbuh lebih cepat hingga mencapai 5,46 persen.

Gambar 5
Pertumbuhan Komponen Konsumsi Rumah Tangga,
Konsumsi Pemerintah dan Konsumsi LNPR Kab. Pamekasan (%)



Pada tahun 2018 komponen Konsumsi Rumah Tangga, LNPRT, dan Konsumsi Pemerintah tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini bertolak belakang dengan kondisi tahun sebelumnya, dimana dua komponen (Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT) tumbuh melambat dari tahun 2016. Kondisi berbeda ditunjukkan komponen Konsumsi Pemerintah, setelah selalu tumbuh melambat dari tahun 2014 hingga tahun 2016, pada dua tahun berikutnya kembali menggeliat hingga tumbuh sebesar 5,66 persen pada tahun 2018.

Gambar 6
Pertumbuhan Komponen PMTB, Ekspor dan Impor
Kab. Pamekasan (%)



Sementara itu, pertumbuhan komponen Ekspor dan Impor menunjukkan pola yang cukup fluktuatif. Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan kedua komponen tersebut selalu tidak searah. Apabila komponen Ekspor tumbuh lebih cepat maka komponen Impor tumbuh melambat, demikian juga sebaliknya. Komoditi ekspor yang keluar dari Pamekasan, diantaranya hasil ekstraksi garam curai dan hasil rajangan daun tembakau. Produksi kedua komoditi tersebut sangat bergantung pada cuaca. Jika cuaca mendukung, kedua komoditi tersebut akan melimpah dan dapat dipastikan bahwa lebih banyak yang diekspor keluar wilayah Pamekasan. Sedangkan komoditi impor yang masuk ke Pamekasan banyak didominasi oleh barang-barang industri non makanan.

Indeks implisit⁶ PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (Rumah Tangga, LNPRT, Pemerintah, dan Perusahaan)

⁶ Indeks perkembangan

akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor atau impor. Tabel 2 dibawah ini adalah tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2014-2018, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

Tabel 2. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kabupaten Pamekasan, 2014-2018 (Tahun sebelumnya=100)

Komponen	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	120,95	124,95	129,44	133,01	137,86
2. Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga	127,59	138,39	142,69	145,59	155,00
3. Konsumsi Pemerintah	133,68	140,62	146,53	154,03	162,56
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	127,05	132,20	139,46	144,82	148,81
5. Perubahan Inventori	140,54	150,98	155,90	156,15	163,76
6. Ekspor	123,29	126,77	132,76	140,01	147,43
7. Impor	121,85	121,76	125,94	132,46	139,71
Produk Domestik Regional Bruto	125,11	132,01	137,82	142,00	146,71

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

3.2. PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing pengeluaran akhir tiap komponen. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, dan sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut ini adalah perilaku masing-masing komponen selama periode 2014-2018.

3.2.1 Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman (selain restoran); pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data pada tabel 3 menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang tercipta di Kabupaten Pamekasan, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Pamekasan maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Selama periode tahun 2014-2018, pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Secara rata-rata, konsumsi per rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2014, setiap rumah tangga di Kabupaten Pamekasan menghabiskan biaya sekitar Rp. 39,64 juta setahun untuk memenuhi kebutuhannya. Pengeluaran tersebut terus meningkat hingga mencapai Rp. 50,70 juta per rumah tangga pada tahun 2018.

Tabel 3. Perkembangan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Pamekasan, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Total Konsumsi Rumah Tangga (Milyar Rp.)					
a. ADHB	8.599,50	9.209,44	9.913,82	10.580,02	11.447,90
b. ADHK 2010	7.110,22	7.370,65	7.658,84	7.954,46	8.303,88
2. Proporsi thd PDRB ADHB (%)	77,70	74,88	73,28	72,27	71,76
3. Konsumsi Perkapita (Ribu Rp.)					
a. ADHB	10.283,73	10.894,69	11.606,05	12.259,52	13.128,38
b. ADHK 2010	8.502,77	8.719,42	8.966,16	9.217,17	9.522,84
4. Pertumbuhan PDRB ADHK (%)					
a. Total Konsumsi Ruta	5,85	3,66	3,91	3,86	4,39
b. Konsumsi Per Kapita	4,73	2,55	2,83	2,80	3,32
5. Jumlah Penduduk	836.224	845.314	854.194	863.004	871.996
6. Jumlah Rumah Tangga	216.964	219.028	221.322	223.611	225.811

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

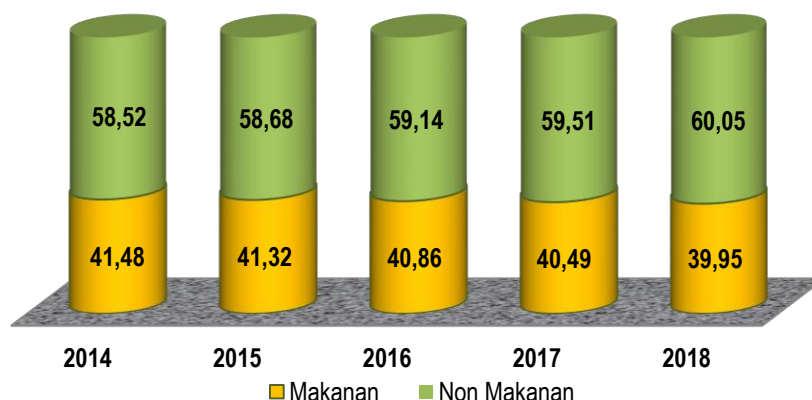
Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi perkapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Perkembangan rata-rata konsumsi perkapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi perkapita secara "riil" meningkat berada pada kisaran 2,50 - 4,75 persen. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2014, yang mencapai 4,73 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Walaupun secara nominal terjadi peningkatan, namun proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB menunjukkan tren sebaliknya. Pada tahun 2014, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDRB

Pamekasan sebesar 77,70 persen, dan turun pada tahun berikutnya menjadi 74,88 persen. Penurunan kontribusi tersebut terjadi baik pada konsumsi makanan maupun konsumsi non makanan. Konsumsi makanan turun 1,29 persen dari 32,23 persen menjadi 30,94 persen, sedangkan non makanan mengalami penurunan kontribusi 1,53 persen menjadi 43,94 persen. Kondisi tersebut secara terus menerus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2018 kontribusi komponen konsumsi rumah tangga sebesar 71,76 persen. Konsumsi makanan turun 0,59 persen dari tahun sebelumnya menjadi 28,67 persen, sebaliknya komponen konsumsi non makanan naik 0,09 persen dari tahun sebelumnya menjadi 43,10 persen.

Turunnya kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDRB Pamekasan, ternyata tidak mempengaruhi pola perbandingan antara konsumsi makanan dan non makanan. Dengan melihat proporsi makanan dan non makanan terhadap total pengeluaran konsumsi rumah tangga, kita peroleh salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Rumah tangga dikatakan relatif lebih sejahtera jika proporsi pengeluaran konsumsi makanannya lebih kecil dibandingkan konsumsi non makanannya.

Gambar 7
Proporsi Makanan dan Non Makanan Terhadap
Total Konsumsi Rata di Kab. Pamekasan 2014-2018 (%)



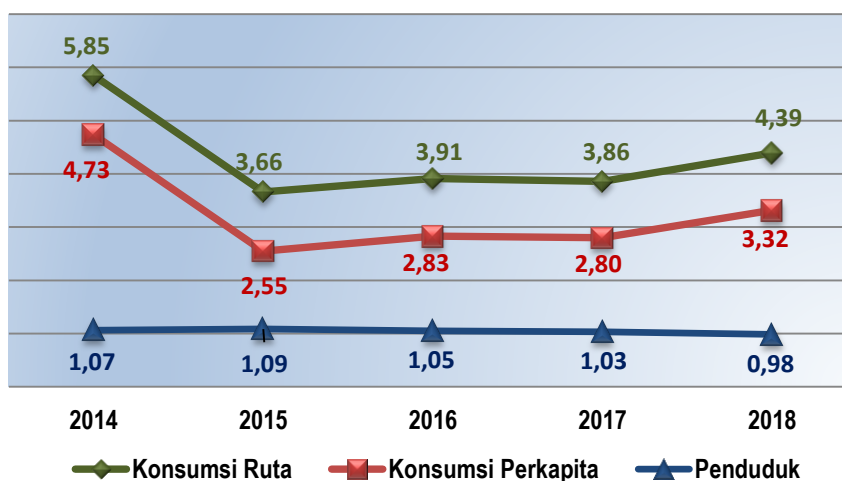
Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2018 pengeluaran konsumsi makanan di Kabupaten Pamekasan proporsinya lebih kecil dibandingkan konsumsi non makanan. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk Pamekasan dalam membelanjakan pendapatannya, tidak hanya

sekedar memenuhi konsumsi makanannya. Tapi sudah punya kesempatan juga untuk memperhatikan kesehatan, pendidikan, rekreasi dan kebutuhan non makanan lainnya.

Ilustrasi gambar 7 diatas menunjukkan bahwa proporsi konsumsi rumah tangga di Kabupaten Pamekasan untuk konsumsi makanan cenderung mengalami penurunan, sebaliknya proporsi konsumsi non makanan secara pasti terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2014, proporsi konsumsi makanan sebesar 41,48 persen terhadap total konsumsi rumah tangga. Selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya proporsinya mengalami penurunan hingga 39,95 persen pada tahun 2018. Sebaliknya, pada periode yang sama konsumsi non makanan terus meningkat proporsinya, dari angka 58,52 persen pada tahun 2014 menjadi 60,05 persen pada tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan penduduk di Kabupaten Pamekasan terus mengalami peningkatan.

Pada tahun 2014 pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga sebesar 5,85 persen. Kemudian berturut-turut sebesar 3,66 persen (2015); 3,91 persen (2016); 3,86 (2017); dan kembali tumbuh lebih cepat menjadi 4,39 persen pada tahun 2018. Sementara itu, pertumbuhan konsumsi perkapita selama lima tahun terakhir adalah 4,73 persen (2014); 2,55 persen (2015); 2,83 persen (2016); 2,80 persen (2017); dan 3,32 persen pada tahun 2018.

Gambar 8
Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Ruta, Konsumsi Perkapita
dan Penduduk Kab. Pamekasan Tahun 2014-2018 (%)



Angka pertumbuhan tersebut menggambarkan bahwa peningkatan total konsumsi “riil” rumah tangga lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang berada pada kisaran 1,04 persen. Hal ini mengindikasikan telah terjadi perbaikan pada tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam tabel 4 dibawah ini. Tabel tersebut menunjukkan tren pertumbuhan setiap tahunnya untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan positif menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan harga dari tahun sebelumnya. Peningkatan harga relatif tinggi hingga diatas 5 persen tercatat pada kelompok konsumsi Hotel dan Restoran, yang terjadi selama rentang tahun 2014-2016. Konsumsi Kesehatan dan Pendidikan terjadi pada tahun 2015. Berikutnya kelompok konsumsi Pakaian dan Alas Kaki, tumbuh 5 persen pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun-tahun berikutnya perubahan harga relatif stabil, berfluktuasi cenderung menurun untuk semua kelompok konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 4. Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Pamekasan, 2014-2018 (%)

Uraian	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman dan Rokok	2,74	3,86	4,00	3,09	3,26
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,71	1,74	5,38	4,77	4,85
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,94	1,75	1,96	2,26	3,01
d. Kesehatan dan Pendidikan	1,70	5,18	3,64	3,63	4,04
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	4,35	2,07	2,76	1,88	3,69
f. Hotel dan Restoran	5,36	5,33	5,18	3,05	4,91
g. Lainnya	3,18	2,50	3,71	2,79	4,73
Konsumsi Akhir Rumah Tangga	3,41	3,31	3,60	2,75	3,65

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

3.2.2. Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Tabel 5. Perkembangan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga Kabupaten Pamekasan, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Total Konsumsi LNPRT (Milyar Rp.)					
a. ADHB	183,40	190,98	204,39	213,16	240,84
b. ADHK 2010	143,74	138,00	143,25	146,42	155,38
2. Proporsi thd PDRB ADHB (%)	1,66	1,55	1,51	1,46	1,51
3. Pertumbuhan ADHK2010 (%)	10,45	(4,00)	3,80	2,21	6,12

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2014-2018 secara umum mengalami peningkatan. Hasil penghitungan atas dasar harga berlaku konsumsi LNPRT pada tahun 2014 sebesar 183,4 miliar rupiah, kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 240,8 miliar rupiah pada tahun 2018. Namun, berdasarkan penghitungan atas dasar harga konstan (2010=100), tren peningkatan sempat berfluktuasi pada tahun 2015, turun sebesar 5,8 miliar rupiah menjadi 138,0 miliar rupiah. Selanjutnya kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 155,4 miliar rupiah pada tahun 2018. Proporsi konsumsi LNPRT terhadap PDRB Kabupaten Pamekasan relatif sangat kecil, hanya berkisar 1,5 persen. Besaran ini

mencatatkan komponen LNPRT menempati posisi terkecil kedua diatas komponen Perubahan Inventori.

Sementara itu, pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014, yang mencapai hingga 10,45 persen. Salah satu faktornya adalah karena konsumsi lembaga-lembaga partai politik pada saat itu mengalami peningkatan pesat dengan adanya kegiatan Pilpres dan Pileg. Demikian juga dengan kondisi pada tahun 2018, selain persiapan pilpres dan pileg di tahun 2019, Kabupaten Pamekasan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah; b) *Excludable Consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga); c) *Rivalrous Competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non Rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut; b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Sampai dengan tahun 2015, pengeluaran konsumsi pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Namun pada tahun 2016, pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami penurunan. Akan tetapi tren tersebut tidak berlangsung lama karena pada dua tahun berikutnya komponen ini kembali meningkat. Pada tahun 2014 total pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 1,67 triliun rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar 1,79 triliun rupiah (2015). Sedangkan pada tahun 2016, Konsumsi Pemerintah turun menjadi 1,74 triliun rupiah. Sementara itu pada dua tahun berikutnya pengeluaran Konsumsi Pemerintah kembali meningkat hingga mencapai 2,10 triliun rupiah.

Tabel 6. Perkembangan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kabupaten Pamekasan, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Total Konsumsi Pemerintah (Milyar Rp.)					
a. ADHB	1.668,60	1.791,13	1.743,75	1.884,17	2.101,11
b. ADHK 2010	1.248,19	1.273,76	1.190,04	1.223,24	1.292,48
2. Proporsi thd PDRB ADHB (%)	15,08	14,56	12,89	12,87	13,17
3. Konsumsi Pemerintah Perkapita (Ribu Rp.)					
a. ADHB	1.995,40	2.118,89	2.041,40	2.183,27	2.409,54
b. ADHK 2010	1.492,66	1.506,85	1.393,17	1.417,42	1.482,21
4. Pertumbuhan PDRB ADHK (%)					
a. Total Konsumsi Pemerintah	4,13	2,74	2,05	(6,57)	2,79
b. Konsumsi Pemerintah Per Kapita	2,91	1,66	0,95	(7,54)	1,74

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada tahun 2015, namun kemudian

mengalami penurunan pada tahun berikutnya menjadi 1,19 trilyun rupiah. Salah satu penyebabnya adalah pada tahun 2016 terjadi penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun pada dua tahun berikutnya kembali meningkat dengan catatan konsumsi sebesar 1,29 trilyun rupiah pada tahun 2018.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah pada tahun 2015, secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah perkapita. Pada tahun 2014 konsumsi pemerintah perkapita atas dasar harga berlaku sebesar 1,99 juta rupiah, kemudian meningkat pada tahun berikutnya menjadi 2,12 juta rupiah. Walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2016, namun pada dua tahun berikutnya kembali meningkat hingga mencapai 2,41 juta rupiah.

Rata-rata konsumsi pemerintah perkapita atas dasar harga konstan sampai dengan tahun 2015, juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, masing-masing senilai 1,49 juta rupiah (2014) dan 1,51 juta rupiah pada tahun 2015. Senada dengan penghitungan ADHB, pada tahun 2016 penghitungan berdasarkan ADHK juga mengalami penurunan menjadi 1,39 juta rupiah. Namun kemudian kembali ada peningkatan dan mencapai 1,48 juta rupiah pada tahun 2018.

Sampai dengan tahun 2015, pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah selalu tumbuh positif. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara "riil" ini menunjukkan peningkatan, baik secara keseluruhan maupun rata-rata per penduduk. Parameter ini adalah

pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah. Selama lima tahun terakhir pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018, dengan rincian untuk konsumsi pemerintah total tumbuh sebesar 5,66 persen dan untuk konsumsi pemerintah perkapita sebesar 4,57 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2016, hingga tumbuh minus baik total konsumsi pemerintah, maupun konsumsi pemerintah perkapita.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (*capital*)⁷. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor. Nilai dari PMTB ini diharapkan dapat terus meningkat, karena asumsinya semakin besar nilai PMTB maka semakin besar pula output suatu wilayah.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Tabel 7 menjelaskan bahwa secara keseluruhan nilai PMTB dalam kurun waktu 2014-2018 mengalami peningkatan. Berdasarkan penghitungan ADHB, PMTB Kabupaten Pamekasan tahun 2014 sebesar Rp. 3,38 triliun, kemudian meningkat tiap tahun hingga mencapai Rp. 5,07 triliun pada tahun 2018. Sementara itu, peranannya terhadap PDRB Pamekasan sedikit berfluktuasi tiap tahunnya, dengan kontribusi berkisar antara 30-31persen. Kontribusi PMTB Bangunan lebih besar dibandingkan Non Bangunan. Selama lima tahun terakhir, rata-rata PMTB Bangunan berkontribusi sekitar 24,5 persen dan cenderung meningkat tiap tahunnya. Sebaliknya, PMTB Non Bangunan cenderung menurun pada kisaran 6,4 persen.

⁷ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

Tabel 7. Perkembangan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Pamekasan, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Total PMTB (Milyar Rp.)					
a. ADHB	3.377,77	3.703,97	4.125,50	4.572,17	5.073,92
b. ADHK 2010	2.658,57	2.801,88	2.958,28	3.157,19	3.409,74
2. Proporsi thd PDRB ADHB (%)	30,52	30,12	30,50	31,23	31,81
a. Bangunan	23,70	23,54	24,30	25,03	25,69
b. Non Bangunan	6,82	6,57	6,20	6,20	6,12
3. Pertumbuhan PMTB (%)	4,96	5,39	5,58	6,72	8,00
a. Bangunan	5,41	6,09	6,62	7,19	8,76
b. Non Bangunan	3,54	3,13	2,16	5,11	5,32

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan komponen PMTB selama lima tahun terakhir berfluktuasi pada kisaran 4,9 - 8,0 persen. Pada tahun 2014, komponen PMTB tumbuh sebesar 4,96 persen dan semakin cepat pada tahun 2015 menjadi 5,39 persen. Tren tersebut berlanjut pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai puncaknya pada tahun 2018 dengan capaian hingga 8,00 persen. Apabila pertumbuhan komponen ini dilihat menurut kelompoknya, akan terlihat tren yang sedikit fluktuatif. Fluktuasi ini terjadi pada PMTB Non Bangunan.

Sejak tahun 2012, pertumbuhan PMTB Bangunan jauh lebih cepat diatas pertumbuhan PMTB Non Bangunan. Pada tahun 2014 PMTB Bangunan tumbuh 5,41 persen, sedangkan PMTB Non Bangunan hanya tumbuh 3,54 persen. Demikian tren ini terus berlanjut hingga tahun 2018, dengan catatan pertumbuhan 8,76 persen untuk PMTB Bangunan dan pertumbuhan PMTB Non Bangunan sebesar 5,32 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir pembangunan fisik di Pamekasan cukup pesat.

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif. Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 8. Perkembangan Komponen Perubahan Inventori Kabupaten Pamekasan, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Total Nilai Perubahan Inventori (Juta Rp.)					
a. ADHB	149.450,68	112.774,13	97.564,79	100.085,00	107.619,83
b. ADHK 2010	106.338,62	74.696,92	62.581,57	64.096,04	65.717,67
2. Proporsi thd PDRB ADHB (%)	1,35	0,92	0,72	0,68	0,67

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori sementara hanya dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen

inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada pada komponen pengeluaran lainnya.

Pada tahun 2014, Perubahan Inventori atas dasar harga berlaku sebesar 149,45 milyar rupiah. Pada dua tahun berikutnya nilai komponen ini cenderung menurun dengan catatan nilai terendah 97,56 milyar rupiah pada tahun 2016. Kemudian pada dua tahun berikutnya kembali meningkat hingga mencapai 107,62 milyar rupiah pada tahun 2018.

Proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB Pamekasan merupakan yang terendah diantara komponen yang lain. Selama lima tahun terakhir kontribusinya cenderung menurun terhadap PDRB Kabupaten Pamekasan. Pada tahun 2014, proporsi perubahan inventori sebesar 1,35 persen, dan terus mengalami penurunan tiap tahunnya, hingga hanya berkontribusi sekitar 0,67 persen pada tahun 2018.

3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Pamekasan, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Secara total, dalam kurun waktu 2014-2018 nilai ekspor barang dan jasa menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2014 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 3,26 triliun rupiah, meningkat menjadi 3,61 triliun rupiah pada tahun 2015. Selanjutnya pada tiga tahun berikutnya nilai ekspor barang dan jasa berturut-turut sebesar 4,09 triliun rupiah; 4,67 triliun rupiah; dan pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 5,13 triliun rupiah. Beberapa komoditas ekspor potensial dari Pamekasan antar lain bawang merah, cabe jamu, dan tembakau. Termasuk sapi potong dan produk garam serta tembakau rajangan.

Tabel 9. Perkembangan Komponen Ekspor Kabupaten Pamekasan, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Total Nilai Ekspor (Milyar Rp.)					
a. ADHB	3.259,24	3.609,24	4.094,35	4.668,44	5.133,15
b. ADHK 2010	2.643,63	2.847,00	3.084,08	3.334,32	3.481,70
2. Proporsi thd PDRB ADHB (%)	29,45	29,35	30,27	31,89	32,18
3. Pertumbuhan ADHK2010 (%)	2,20	7,69	8,33	8,11	4,42

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sejalan dengan nilai ekspor atas dasar harga berlaku, nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama. Nilai “riil” masing-masing tahun sebesar 2,64 triliun rupiah (2014); 2,85 triliun rupiah (2015); 3,08 triliun rupiah (2016); dan 3,33 triliun pada tahun 2016, serta pada tahun 2018 sebesar 5,13 triliun rupiah. Sementara itu pada periode yang sama, proporsi komponen ekspor terhadap PDRB Pamekasan berfluktuasi cenderung meningkat dari 29,45 persen pada tahun 2014 menjadi 32,18 persen pada tahun 2018.

Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan riil total ekspor sangat fluktuatif dan mencapai angka tertinggi pada tahun 2016 hingga mencapai 8,33 persen. Namun pada dua tahun berikutnya, pertumbuhan ekspor terus tumbuh melambat, dan hanya mencapai 4,42 persen pada tahun 2018.

3.2.7. Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB dan inventori serta ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. Sedangkan PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Pamekasan. Sehingga untuk

mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (produksi).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Pamekasan diluar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Pamekasan terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri.

Tabel 10. Perkembangan Komponen Impor Kabupaten Pamekasan, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Total Nilai Impor (Milyar Rp.)					
a. ADHB	6.170,91	6.318,23	6.651,34	7.377,47	8.152,47
b. ADHK 2010	5.064,54	5.189,13	5.281,30	5.569,48	5.835,41
2. Proporsi thd PDRB ADHB (%)	55,76	51,37	49,17	50,39	51,11
3. Pertumbuhan ADHK2010 (%)	5,35	2,46	1,78	5,46	4,77

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa total nilai impor barang dan jasa yang masuk ke Kabupaten Pamekasan meningkat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2014 nilai impor barang dan jasa atas dasar harga berlaku mencapai 6,17 trilliun rupiah, kemudian

meningkat di tahun 2015 menjadi 6,32 triliun rupiah, 6,65 triliun rupiah pada tahun 2016, dan menjadi 7,38 triliun rupiah pada tahun 2017, serta meningkat lagi pada tahun 2018 hingga mencapai 8,15 triliun rupiah.

Kondisi berbeda ditunjukkan oleh tren proporsinya terhadap PDRB Pamekasan. Pada tahun 2014 impor barang dan jasa memberikan kontribusi sebesar 57,76 persen. Pada tahun berikutnya kontribusi impor barang dan jasa menurun menjadi 51,37 persen dan terus berlanjut pada tahun berikutnya hingga menjadi 49,17 persen. Walaupun kontribusinya kembali meningkat pada dua tahun berikutnya, namun angkanya masih lebih rendah dibandingkan tahun 2014. Pada tahun 2018, kontribusi komponen ini sebesar 51,11 persen terhadap PDRB Kabupaten Pamekasan. Jika melihat tren yang cenderung menurun, mengindikasikan bahwa ketergantungan Kabupaten Pamekasan terhadap wilayah lain lambat laun mulai berkurang, karena untuk komoditi tertentu sudah mampu disediakan sendiri.

4

Perkembangan Agregat PDRB Kab. Pamekasan Menurut Pengeluaran



BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KAB. PAMEKASAN MENURUT PENGELUARAN

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1. PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Pamekasan yang di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Tabel 11. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Pamekasan, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Nilai Nominal PDRB (Milyar Rp.)					
a. ADHB	11.067,05	12.299,30	13.528,03	14.640,58	15.952,06
b. ADHK 2010	8.846,16	9.316,86	9.815,77	10.310,24	10.873,49
2. PDRB Perkapita (Ribu Rp.)					
a. ADHB	13.234,55	14.549,97	15.837,19	16.964,67	18.293,73
b. ADHK 2010	10.578,70	11.021,77	11.491,27	11.946,92	12.469,65
3. Proporsi thd PDRB ADHB (%)	4,51	4,19	4,26	3,97	4,38
4. Jumlah Penduduk (Jiwa)	836.224	845.314	854.194	863.004	871.996
5. Pertumbuhan Penduduk (%)	1,07	1,09	1,05	1,03	0,98

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dari series data PDRB menurut pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan penduduk). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, antara lain dapat dilihat dari data PDRB perkapita. Total nilai PDRB atas dasar harga berlaku suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut, akan diperoleh angka PDRB perkapita.

Pada tahun 2018, PDRB Perkapita Kabupaten Pamekasan mencapai 18,29 juta rupiah atau meningkat 1,3 juta rupiah dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan jika dibandingkan tahun 2010, PDRB perkapita tahun ini meningkat 9,5 juta rupiah. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya, PDRB perkapita tetap mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa penduduk Pamekasan dari tahun ke tahun semakin produktif. Selama lima tahun terakhir, PDRB perkapita di Kabupaten Pamekasan rata-rata meningkat Rp. 1,26 juta tiap tahunnya.

Dalam kurun waktu 2014-2018, PDRB Perkapita mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2014 dengan capaian 4,51 persen, namun pada tahun-tahun berikutnya berfluktuasi cenderung melambat menjadi 4,38 persen pada tahun 2018. Kondisi ini sejalan dengan fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan.

4.2. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor) untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Aktivitas ekonomi di Kabupaten Pamekasan masih berkuat untuk memenuhi konsumsi akhir, baik konsumsi akhir rumah tangga, LNPRT maupun konsumsi pemerintah. Hal ini terlihat dari proporsi total konsumsi akhir terhadap PDRB yang mencapai diatas 85 persen. Namun demikian selama rentang waktu antara tahun 2014 sampai dengan 2018, proporsinya cenderung menurun. Pada tahun 2014, proporsi total konsumsi akhir terhadap PDRB Pamekasan sebesar 94,44 persen, dan terus mengalami

penurunan menjadi 86,45 persen pada tahun 2018. Tren ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Pamekasan tidak lagi hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, namun lambat laun sudah bergeser untuk pembentukan modal, investasi dan ekspor.

Diantara ketiga komponen konsumsi akhir, pengeluaran konsumsi rumah tangga mempunyai persentase tertinggi, berikutnya pengeluaran konsumsi pemerintah (terbesar kedua) dan konsumsi LNPR (persentase terkecil). Pada tahun 2018, proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB Kab. Pamekasan mencapai 71,76 persen. Proporsi ini cukup dominan jika dibandingkan dengan konsumsi pemerintah yang proporsinya sebesar 13,17 persen, dan konsumsi LNPR yang hanya sebesar 1,51 persen. Tren komposisi pada tahun ini sama seperti komposisi pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 12. Proporsi Total Konsumsi Akhir Terhadap PDRB Kabupaten Pamekasan, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Akhir ADHB (Milyar Rp.)	10.451,50	11.191,54	11.861,96	12.677,35	13.789,85
a. Rumah Tangga	8.599,50	9.209,44	9.913,82	10.580,02	11.447,90
b. LNPR	183,40	190,98	204,39	213,16	240,84
c. Pemerintah	1.668,60	1.791,13	1.743,75	1.884,17	2.101,11
2. PDRB ADHB (Milyar Rp.)	11.067,05	12.299,30	13.528,03	14.640,58	15.952,06
3. Proporsi Konsumsi Akhir (%)	94,44	90,99	87,68	86,59	86,45

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Demikian halnya apabila kita bandingkan ketiga komponen konsumsi akhir dengan total konsumsi akhir dalam PDRB Pengeluaran. Selama lima tahun terakhir, dominasi pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga rata-rata 83 persen proporsinya terhadap total komponen konsumsi akhir. Sedangkan untuk pengeluaran konsumsi akhir pemerintah rata-rata 15 persen, dan pengeluaran konsumsi akhir LNPR rata-rata

hanya sekitar 2 persen. Melihat persentase ketiga komponen konsumsi akhir tersebut, penurunan proporsi konsumsi akhir rumah tangga merupakan yang paling berpengaruh terhadap penurunan proporsi total konsumsi akhir terhadap PDRB Pamekasan.

<https://pamekasankab.bps.go.id>

5

Penutup



BAB V

P E N U T U P

1. Kemampuan wilayah Kabupaten Pamekasan dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Kondisi ini digambarkan oleh nilai PDRB Kabupaten Pamekasan yang cenderung mengalami peningkatan. Dibandingkan tahun 2014, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pamekasan meningkat 4,88 triliun rupiah dari 11,07 triliun rupiah menjadi 15,95 triliun rupiah pada tahun 2018.
2. Hasil penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan juga mengalami peningkatan. Dibandingkan tahun 2014, PDRB Pamekasan pada tahun 2018 meningkat 2,03 triliun rupiah menjadi 10,87 triliun rupiah.
3. Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Pada tahun 2014, setiap rumah tangga di Kabupaten Pamekasan menghabiskan biaya sekitar Rp. 39,6 juta setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut terus meningkat hingga mencapai Rp. 50,7 juta per rumah tangga pada tahun 2018.
4. Total pengeluaran konsumsi LNPRRT dalam kurun waktu tahun 2014-2018 secara umum mengalami peningkatan. Hasil penghitungan atas dasar harga berlaku konsumsi LNPRRT pada tahun 2014 sebesar 183,4 miliar rupiah, kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 240,8 miliar rupiah pada tahun 2018.
5. Sampai dengan tahun 2015, pengeluaran konsumsi pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Namun pada tahun 2016, pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami penurunan. Akan tetapi tren tersebut tidak berlangsung lama karena pada dua tahun berikutnya komponen ini kembali meningkat. Pada tahun 2018 pengeluaran Konsumsi Pemerintah mencapai 2,1 triliun rupiah.
6. Berdasarkan penghitungan ADHB, komponen PMTB Kabupaten Pamekasan tahun 2014 sebesar Rp. 3,38 triliun, kemudian meningkat tiap tahun hingga mencapai

Rp. 5,07 triliun pada tahun 2018. Sementara itu, peranannya terhadap PDRB Pamekasan sedikit berfluktuasi tiap tahunnya, dengan kontribusi berkisar antara 30-32 persen.

7. Pada tahun 2014, Perubahan Inventori atas dasar harga berlaku sebesar 149,45 milyar rupiah. Pada dua tahun berikutnya nilai komponen ini cenderung menurun dengan catatan nilai terendah 97,56 milyar rupiah pada tahun 2016. Kemudian pada dua tahun berikutnya kembali meningkat hingga mencapai 107,62 milyar rupiah pada tahun 2018.
8. Pada tahun 2014 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 3,3 triliun rupiah, meningkat menjadi 3,6 triliun rupiah pada tahun 2015. Selanjutnya pada tiga tahun berikutnya nilai ekspor barang dan jasa berturut-turut sebesar 4,1 triliun rupiah; 4,7 triliun rupiah; dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 5,1 triliun rupiah.
9. Pada tahun 2014 nilai impor barang dan jasa atas dasar harga berlaku mencapai 6,2 triliun rupiah, kemudian meningkat di tahun 2015 menjadi 6,3 triliun rupiah, 6,6 triliun rupiah pada tahun 2016, dan menjadi 7,4 triliun rupiah pada tahun 2017, serta meningkat lagi pada tahun 2018 hingga mencapai 8,2 triliun rupiah.
10. Pada tahun 2018, PDRB Perkapita Kabupaten Pamekasan mencapai 18,3 juta rupiah atau meningkat 1,3 juta rupiah dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan jika dibandingkan tahun 2010, PDRB perkapita tahun ini meningkat 9,5 juta rupiah.
11. Pada tahun 2018, proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB Kab. Pamekasan mencapai 71,76 persen. Proporsi ini cukup dominan jika dibandingkan dengan konsumsi pemerintah yang proporsinya sebesar 13,17 persen, dan konsumsi LNPRT yang hanya sebesar 1,51 persen.

<https://pamekasankab.bps.go.id>

Lampiran



Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pamekasan Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku, 2014-2018 (Juta Rupiah)

Komponen	2014	2015	2016*	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	8.599.498,5	9.209.437,2	9.913.815,7	10.580.016,2	11.447.896,7
2. Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga	183.398,5	190.978,0	204.394,4	213.164,4	240.841,3
3. Konsumsi Pemerintah	1.668.601,9	1.791.125,8	1.743.750,2	1.884.171,7	2.101.107,1
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.377.768,7	3.703.969,6	4.125.497,0	4.572.166,7	5.073.923,5
5. Perubahan Inventori	149.450,7	112.774,1	97.564,8	100.085,0	107.619,8
6. Ekspor	3.259.239,8	3.609.239,2	4.094.354,6	4.668.437,4	5.133.145,8
7. Impor	6.170.907,8	6.318.228,5	6.651.343,2	7.377.465,4	8.152.471,9
Produk Domestik Regional Bruto	11.067.050,2	12.299.295,3	13.528.033,5	14.640.576,0	15.952.062,2

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pamekasan Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan (2010=100), 2014-2018 (Juta Rupiah)

Komponen	2014	2015	2016*	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	7.110.221,2	7.370.647,0	7.658.837,7	7.954.455,6	8.303.882,5
2. Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga	143.743,8	137.998,7	143.248,6	146.416,3	155.377,0
3. Konsumsi Pemerintah	1.248.194,4	1.273.759,8	1.190.039,7	1.223.241,8	1.292.477,3
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.658.571,4	2.801.880,0	2.958.281,1	3.157.187,4	3.409.741,6
5. Perubahan Inventori	106.338,6	74.696,9	62.581,6	64.096,0	65.717,7
6. Ekspor	2.643.630,7	2.846.999,6	3.084.082,8	3.334.320,5	3.481.697,4
7. Impor	5.064.537,8	5.189.125,4	5.281.297,8	5.569.476,1	5.835.406,8
Produk Domestik Regional Bruto	8.846.162,4	9.316.856,7	9.815.773,6	10.310.241,6	10.873.486,8

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kab. Pamekasan Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku, 2014-2018 (Persen)

Komponen	2014	2015	2016*	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	77,70	74,88	73,28	72,27	71,76
2. Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga	1,66	1,55	1,51	1,46	1,51
3. Konsumsi Pemerintah	15,08	14,56	12,89	12,87	13,17
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,52	30,12	30,50	31,23	31,81
5. Perubahan Inventori	1,35	0,92	0,72	0,68	0,67
6. Ekspor	29,45	29,35	30,27	31,89	32,18
7. Impor	55,76	51,37	49,17	50,39	51,11
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 4. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pamekasan Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan (2010=100), 2014-2018 (Persen)

Komponen	2014	2015	2016*	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,85	3,66	3,91	3,86	4,39
2. Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga	10,45	-4,00	3,80	2,21	6,12
3. Konsumsi Pemerintah	2,74	2,05	-6,57	2,79	5,66
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,96	5,39	5,58	6,72	8,00
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	2,20	7,69	8,33	8,11	4,42
7. Impor	5,35	2,46	1,78	5,46	4,77
Produk Domestik Regional Bruto	5,62	5,32	5,35	5,04	5,46

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kab. Pamekasan Menurut Pengeluaran Tahun 2014-2018 (Persen)

Komponen	2014	2015	2016*	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	120,95	124,95	129,44	133,01	137,86
2. Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga	127,59	138,39	142,69	145,59	155,00
3. Konsumsi Pemerintah	133,68	140,62	146,53	154,03	162,56
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	127,05	132,20	139,46	144,82	148,81
5. Perubahan Inventori	140,54	150,98	155,90	156,15	163,76
6. Ekspor	123,29	126,77	132,76	140,01	147,43
7. Impor	121,85	121,76	125,94	132,46	139,71
Produk Domestik Regional Bruto	125,11	132,01	137,82	142,00	146,71

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 6. Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Pamekasan Menurut Pengeluaran Tahun 2014-2018 (Persen)

Komponen	2014	2015	2016*	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,41	3,31	3,60	2,75	3,65
2. Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga	1,56	8,47	3,10	2,03	6,47
3. Konsumsi Pemerintah	1,79	5,19	4,20	5,12	5,54
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,79	4,05	5,49	3,84	2,75
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	5,86	2,83	4,72	5,46	5,30
7. Impor	2,68	-0,07	3,44	5,18	5,47
Produk Domestik Regional Bruto	5,73	5,52	4,40	3,03	3,31

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PAMEKASAN**

Jl. Bonorogo No. 34 A Pamekasan 69323
Telp: 0324-328834, email : pamekasan@bps.go.id
homepage : <https://pamekasankab.bps.go.id>